



Komunikasi Politik Kepala Desa dalam Mendorong Inovasi Pembangunan Desa: Studi Kasus Tiga Desa di Lereng Gunung Ungaran, Jawa Tengah

Nugraheni Arumsari^{1,2✉}, Wenny Eka Septina^{1,2}, Muhammad Luthfi^{1,3}, Nur Kholis Ali Rizki^{1,3}

¹ Program Studi Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

² Pusat Kajian Politik Lokal, Program Studi Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

³ Indonesian Institute for Development and Social Studies, Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima 17 Oktober 2016
Disetujui 20 Desember 2016
Dipublikasi 15 Januari 2017

Keywords:
*Political Communication;
Development; Village
Innovation; Mount. Ungaran-
Central Java*

Abstrak

Komunikasi merupakan wahana untuk penyampaian informasi kepada khalayak umum. Kepala desa sebagai kepala pemerintahan tertinggi yang ada di desa dituntut untuk bisa berinteraksi dengan baik dan memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Inovasi pembangunan yang ada di desa tidak bisa berjalan dengan baik tanpa ada komunikasi yang baik antara kepala desa, tokoh masyarakat, dan warga desa. Penelitian ini bertempat di Desa Kalisidi, Desa Gonoharjo, dan Desa Diwak. Dari ketiga desa yang menjadi objek penelitian gaya komunikasi politik yang dilakukan oleh kepala desa meliputi: (1) Pendekatan langsung dengan masyarakat (saluran komunikasi interpersonal); (2) Pendekatan antar Lembaga Masyarakat Desa (saluran komunikasi kelompok organisasi serta jaringan komunikasi); (3) Pembuatan Papan Informasi Anggaran Desa sebagai wujud Transparansi, Menggunakan media sosial (FB, Tweeter, Website, Instagram, Youtube) sebagai sarana Informasi Publik; (4) Pembuatan Papan Iklan sebagai media sosialisasi gerakan desa wisata dan desa edukasi.

Abstract

Communication is a strategy to deliver information to the public and medium to develop a good will in citizen both human and infrastructure development. Good communication must be acquired by many stakeholders of the citizen in all hierarchy of the government; one of them is the village headman. The village headman as a stakeholder of the village is required to be able to interact properly in term of communication and village development. Innovation and ideas about latest development cannot run properly without good communication between village headman, community leaders and villagers. This study investigated the communication style done by the village headman. It was conducted in village Kalisidi, Gonoharjo and Diwak. As the result, there are some communication style done in these villages among stake holders and the citizen. They are: (1) A direct approach to the society (informal communication to village communities); (2) Approach among Village Community Institutions (communication group of community and communication networks); (3) Public Communication by using Social Media, and (4) Public Information Board as a medium to inform village annual budget as a form of transparency and socialization of village resort and rural education movement.

© 2017 Universitas Negeri Semarang

ISSN 2477 – 8060

✉Alamat korespondensi:

Universitas Negeri Semarang, Kampus Sekaran, Kel. Sekaran, Kec. Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah 50229, Indonesia
Email: nugraheni.arumsari@mail.unnes.ac.id

Pendahuluan

Pelimpahan wewenang ataupun otonomi merupakan hal yang esensial dalam suatu negara kesatuan. Akan tetapi, harus pula diingat bahwa otonomi di negara kesatuan mempunyai batas-batas tertentu dan terikat pada prinsip-prinsip otonomi itu tidak boleh mengancam keutuhan negara kesatuan itu sendiri. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur bentuk otonomi yang diberikan kepada daerah.

Hal konteks otonomi ini dapat dilihat bahwa kepala daerah harus mempunyai suatu kebebasan untuk mengatur dan mengurus kepentingan-kepentingan di dalam daerahnya sendiri dan batasan-batasan wewenang yang telah diterimanya. Namun pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah harus bertujuan untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyatnya.

Sistem desentralisasi kekuasaan merumuskan bahwa tidak seluruh kekuasaan terpusat dan didominasi oleh pemerintah pusat tetapi kekuasaan terdistribusikan ke pemerintah daerah. Daerah diberi kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri sesuai kondisi, kepribadian dan kepentingan umum yang sesuai karakter daerah masing-masing. Masyarakat daerah dipandang lebih mengetahui kebutuhan untuk kemajuan daerah yang bersangkutan sehingga diharap daerah itu berkembang berdasarkan

potensi, vitalitas, inisiatif lokal dan terbingkai menuju pembangunan secara nasional.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memiliki dua pendekatan dalam perencanaan pembangunan yang meliputi: perencanaan pembangunan partisipatif atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) partisipatif (Suroso et. al., 2014). Kedua pendekatan diatas bermaksud untuk melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan, untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa saling memiliki.

Indonesia terdiri dari kumpulan daerah, pulau, suku bangsa, dan agama yang beraneka ragam. Sebagai negara kesatuan Indonesia cukup direpotkan munculnya konflik di aras lokal dan masih belum meratanya pembangunan di tingkat daerah. selain Tujuan dari otonomi daerah seharusnya bisa membuat pembangunan berdasarkan kebutuhan lokal, dan juga daerah dituntut untuk bisa melibatkan masyarakatnya dalam mengambil keputusan akan tetapi prakteknya masih banyak kekurangan dan bahkan penyelewenan yang dilakukan oleh pemerintah daerah lebih khususnya di pemerintah desa masih dirasa belum bisa optimal karena masih banyaknya aturan yang belum jelas dan belum memiliki kesinambungan.

Lahirnya Undang-undang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa memiliki misi yang

sangat mulia, desa sebagai institusi yang paling dekat dengan masyarakat diberikan kehususan oleh negara untuk menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintah dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera (Eko, 2014).

Awalnya kita mengenal otonomi desa, di undang-undang yang baru kita bisa mendeskripsikan kemandirian desa atau desa mandiri. Meskipun di UUD 1945 kita tidak mengenal otonomi asli, tetapi konsep ini dikenal luas dalam banyak literature dan perbincangan tentang desa. Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah (Widjaja, 2003). Sebaliknya pemerintah memiliki kewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan harta benda, serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Secara langsung konsep otonomi desa memerlukan kesiapan di muka dari semua pihak, baik sumber daya manusia dan infrastruktur desa untuk menunjang kelangsungan sumberdaya organisasi desa.

Desa merupakan organisasi pemerintahan yang paling kecil, paling bawah, paling depan, dan paling dekat dengan masyarakat. Paling “kecil” berarti bahwa

wilayah ataupun tugas-tugas pemerintahan yang diemban desa memiliki cakupan yang lebih kecil dibandingkan tingkat pemerintah ditasnya seperti Kabupaten/Kota dan Provinsi. Paling “bawah” secara susunan pemerintahan, desa berada di paling bawah dari pemerintah lainnya, namun bawah yang dimaksud bukan desa berada di bawah kabupaten/kota atau kepala desa itu bukan bawahan bupati, sehingga hal yang sama terjadi seperti keberadaan kabupaten/kota di wilayah provinsi. Paling “bawah” juga dapat diartikan bahwa desa merupakan organisasi pemerintahan yang berhubungan langsung dan menyentuh dalam kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat sehari-hari

Paling “depan” bisa diartikan pemerintah desa berhubungan langsung dengan warga masyarakat baik dalam bidang pemerintahan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat. Kondisi yang terjadi masyarakat sering kali proses pelayanan administrasi dan penyelesaian permasalahan sosial lebih banyak dibawa ke pemerintah desa, sehingga kepada desa dan perangkat desa diuntut untuk bisa melayani masyarakat tanpa mengenal hari libur. Sedangkan istilah paling “dekat” desa dirasa sebagai organisasi pemerintahan secara administrative dan geografis dirasa paling dekat untuk diakses. Sehingga secara sosial, pemerintah desa itu menyatu dengan denyut nadi kehidupan sosial budaya sehari-hari masyarakat setempat.

Oleh sebab itulah, dalam pandangan komunikasi pada asas demokrasi, salah satu cara kepala desa untuk memperoleh persepsi yang baik di masyarakat adalah dengan cara berkomunikasi. Tentu saja yang dimaksud dengan komunikasi itu bisa menggunakan media massa (Koran, Majalah, Radio, TV, Website, Facebook, Twitter, Instagram) maupun non-media massa (surat, leaflet, booklet, spanduk, baligo, saluran komunikasi interpersonal, saluran komunikasi kelompok dan organisasi serta jaringan komunikasi). Prosedur yang dijalankan dalam mendiring demokratisasi menuju pengelolaan sumber daya alam ini memang dinamis, hal ini disebabkan demokrasi kita memang tidak menganut single sided (pandangan tunggal) melainkan melalui musyawarah mufakat maupun voting (Permatasari dan Seftyono, 2014).

Dalam praktiknya, seorang kepala desa dapat mendayagunakan secara simultan saluran-saluran komunikasi tersebut untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Adanya batasan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki ini pada hakikatnya tidak semata karena adanya lembaga legislatif di tingkat desa, melainkan juga disebabkan oleh warga desa mengenal pemimpinnya dengan baik. Dengan mengenal, pemimpin merasa selalu diawasi dan dipaksa untuk menjalin komunikasi yang baik, sekaligus memiliki karakteristik yang pro dengan masyarakat. Dengan demikian, transparansi kinerja pemerintah desa secara kelembagaan maupun

komunikasi personal kepala desa menjadi syarat utama dalam mewujudkan sinergitas yang baik di antara warga dan pemerintah desa, serta aktor lokal yang lain.

Selain itu, melalui semangat inilah, kajian mengenai *governance* di desa juga menarik untuk terus dikaji, dikembangkan, dan diwujudkan di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa agar transparansi kinerja pemerintah desa dan sinergitas antar aktor senantiasa terwujud. Praktisnya, *good governance* di level desa mencakup otonomi desa yang meliputi pengambilan keputusan berbasis kearifan lokal di level desa. Sedangkan dari sisi ekonomi, merupakan pengelolaan sumber daya desa (baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia) berbasis pada partisipasi, aspirasi, dan kepentingan dari warga desa itu sendiri (Dwipayana dan Eko, 2003).

Pemimpin-pemimpin di aras lokal tingkat desa ini juga dituntut untuk membuat kebijakan yang mendukung performa, kemampuan, dan kepentingan warganya secara luas. Interaksi di antara mereka pun akan didorong dalam rangka memajukan potensi yang ada. Dorongan tersebut termasuk dalam upaya untuk memastikan, betapa pemimpin lokal harus mengetahui potensi wilayahnya sekaligus cara cerdas untuk memaksimalkan potensi tersebut. Hal ini tampak pada wilayah-wilayah yang memiliki sumber daya alam lokal yang dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa (PADes). Pendekatan ini dapat dilihat

dari aspek ekonomis, ekologis maupun politis (Seftyono, 2012).

Dalam konteks inovasi yang lebih luas, pemimpin-pemimpin desa juga dituntut untuk dapat melaksanakan strategi komunikasi politik yang baik sehingga masyarakat akan mendukung setiap program dari pemimpin desa. Pembangunan yang diupayakan adalah pembangunan yang mengandalkan pada kekuatan, karakteristik, dan inisiatif mandiri desa tersebut (Maskun, 1994). Sehingga, pengelolaan yang ada tidak hanya mencakup potensi-potensi formal; seperti: pendidikan, ekonomis, dan sebagainya, melainkan juga meliputi rasa percaya (*trust*), jejaring sosial (*network*), hingga respon timbal balik yang lebih baik (*resiprokal*) di antara aktor lokal di dalamnya. Potensi yang dimiliki kemudian melalui komunikasi politik yang baik akan bisa dikelola dalam memaksimalkan sumber daya yang ada termasuk didalamnya sumber daya alam.

Kajian Pustaka

Metodologi

Penelitian ini dilaksanakan untuk menjawab beberapa pertanyaan penting terkait komunikasi politik yang dilakukan kepala desa dalam pendorong pembangunan di aras lokal. Adapun rumusan masalah yang diajukan untuk mengkerangkai kajian ini adalah:

1. Bagaimana proses interaksi dan strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh

kepala desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di daerahnya?

2. Bagaimana Inovasi yang dilakukan kepala desa untuk menengka pembangunan yang ada di desa?

Sedangkan tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Memetakan proses interaksi dan strategi komunikasi politik yang dilakukan antara kepala desa, elit politik desa, dan warga desa.
2. Mengetahui inovasi yang di lakukan oleh kepala desa dalam meningkatkan pembangunan yang ada di desa.

Metode penelitian yang dilakukan untuk menganalisis hubungan antara komunikasi politik dengan pembangunan desa adalah dengan memakai pendekatan indepth interview dan juga kajian literatur. Untuk wawancara sendiri, dilakukan wawancara mendalam kepada beberapa aparat desa dan juga pengurus organisasi desa dan sesepuh desa. Termasuk juga menjalankan focus group discussion. Di sisi lain, untuk menganalisis temuan-temuan tersebut diperkuat analisis literatur dari berbagai dokumen maupun referensi sekunder.

Pemilihan responden berdasarkan posisi strategis mereka termasuk pengetahuan mereka dalam memahami kondisi sosial ekologis lingkungan mereka (Seftyono, 2010; Seftyono, 2011). Responden yang di wawancara: (1) Desa Kalisidi Kabupaten Semarang: Kepala Desa, Perangkat Desa, Sesepuh Warga. (2) Desa Nglimut Kabupaten

Kendal: Sekeretaris Desa, Perangkat Desa, Sesepuh Warga, (3) Desa Diwak Kabupaten Semarang: Kepala Desa, Perangkat Desa, Sesepuh warga.

Komunikasi Politik dan Pembangunan

Komunikasi politik secara umum dapat dimaknai dalam kerangka politik sebagai upaya actor dalam mencapai tujuannya. Berpolitik pada dasarnya tiada lain adalah berkomunikasi. Menyampaikan gagasan kepada orang lain. Media-media yang digunakan dalam komunikasi politik ini beragam bentuk. Bisa berupa media massa maupun non media massa.

Pada prakteknya, media yang digunakan dalam berpolitik ini saling berkelit kelindan, bukan bersifat tunggal. Menurut Hamad (2010), terdapat beberapa beberapa poin penting dari komunikasi politik sendiri adalah penyampaian pesan terhadap konstituen. Oleh karenanya, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Pertama, pesan yang disampaikan kepada khalayak. Kedua, campur tangan media yang menyajikan pesan. Ketiga, bagaimana (proses) framing atas isu dibangun.

Keberadaan komunikasi politik dan pembangunan dapat dilihat dalam ruang bagaimana pemimpin hendak menjalankan visi misinya berupa kebijakan-kebijakan. Maupun di sisi lain juga peran kontrol publik dalam proses hingga implementasi kebijakan. Curran (2002) misalnya, menyatakan ada tiga peran media dalam sistem politik demokratis

yaitu: Pertama, *watchdog role*; media dalam hal ini serlaku sebagai alat untuk memonitor aktivitas negara, dan berani berposisi seimbang untuk mengawal jalannya kekuasaan. Kedua, *information dan debate*; media mesti mampu menjembatani kepentingan dua arah: pemerintah dan rakyat. Dengan kata lain, media (dalam bingkai demokrasi) tidak boleh hanya menjadi corong salah satu pihak. Ketiga, *voice of the people*; media menjadi sarana penyampai gagasan publik terhadap negara atau pembuat kebijakan.

Lebih jauh, komunikasi politik ini tidak hanya menggambarkan interaksi langsung antara pembuat kebijakan dengan warga. Media, dalam hal ini justru memberikan jembatan untuk satu komunitas saling belajar dengan komunitas yang lain. Media lokal dalam demokratisasi daerah misalnya, dapat dikatakan sebagai alat untuk saling memberikan pengaruh kebaikan. Saling menginspirasi antar daerah.

Di Indonesia sendiri, keberadaan komunikasi politik dan juga media, mulai marak pasca reformasi. Komunikasi politik berjalan sangat dinamis. Media juga hampir dapat dikatakan tanpa ada lagi intervensi pemerintah. Dalam kaitan demokratisasi dan reformasi di Indonesia ini, media lokal dapat memainkan berbagai macam peran dalam desentralisasi dan penguatan pembangunan daerah. Menurut Yusuf (2011) ada beberapa peran penting media di Indonesia: Pertama, beririsan dengan Curran, media melaksanakan

peran pengawasan dengan cara menyiarkan berbagai macam bentuk penyimpangan, baik yang terjadi di tingkat masyarakat, DPRD, maupun di tingkatan birokrasi pemerintahan. Kedua, memberikan ruang diskursus wacana pembangunan dan urusan publik. Ketiga, media lokal dapat memediasi gagasan antar aktor politik.

Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Pembangunan Desa

Konsepsi inovasi desa, dikaitkan dengan pemerintahan lokal, tidak dapat dilepaskan dari sudut pandang pemerintah. Dalam hal ini, Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Jawa Tengah (2013) mendefinisikan Desa Inovatif sebagai desa yang mampu memanfaatkan sumber daya alam secara inovatif. Pemanfaatan sumber daya alam ini tentu saja berkenaan dengan bagaimana desa nantinya mampu secara mandiri mengelola potensi-potensi yang ada dalam rangka mengoptimisasi sumber daya tersebut sebagai bagian dari pembangunan desa. Desa tidak lagi bisa didudukkan dalam rangka “penadah dana pusat” melainkan mereka harus mampu berkerja mandiri untuk memakmurkan warganya.

Konsepsi tentang inovasi pembangunan desa memang mengalami kendala pendekatan operasional. Pendekatan-pendekatan yang selama ini selalu bermain pada angka-angka yang dikuantifikasi mulai meruju pada data-data kualitatif. Pembangunan tidak lagi untuk mencapai

pertumbuhan. Meskipun hal tersebut juga penting, akan tetapi pemerataan (*equity*), pertumbuhan (*eficiency*), dan keberlanjutan (*sustainability*) yang berimbang dalam pembangunan ekonomi juga menjadi prioritas. Menurut Suharyanto dan Sofianto (2012) keberadaan pemerataan (*equity*), pertumbuhan (*eficiency*) dan keberlanjutan (*sustainability*) menjadi sangat penting bagi pembangunan desa masa kini.

Merujuk pada Todaro (1989) bahwa pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atau struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, maka perlu melibatkan segenap stakeholder yang saling bekerjasama. Oleh karenanya, pembangunan yang ada di desa tidak dapat dilepaskan dari bagaimana kita membaca alam, budaya dan potensi ekonomi yang terkandung di dalamnya.

Temuan dan Diskusi

Kajian mengenai kepemimpinan dan pengelolaan desa di Indonesia sudah berjalan lama. Dapat dikatakan bahwa informasi terkait desa atau institusi setingkat desa di Indonesia sudah sama tuanya dengan keberadaan Indonesia itu sendiri (Antlov, 2003). Namun demikian, konsepsi tentang Desa mulai menguat ketika kepemimpinan Soeharto dalam rezim orde baru. Pada masa tersebut, terjadi keseragaman pemerintahan di

tingkat desa, bahkan hingga mengatur desa-desa adat yang ada di banyak tempat di nusantara. Lebih jauh, diskursus politik elit desa juga mengalami pasang surut.

Jika sebelumnya di tingkat desa terdapat lembaga-lembaga adat yang memiliki kekuasaan lebih tinggi dibanding desa secara administratif, maka pada masa orde baru hal ini menjadi ternegasikan (Juliantara, 2000). Otoritas administratif lebih berkuasa dalam menciptakan ide-ide pembangunan desa.

Perubahan tentang level desa mulai ada perubahan kembali ketika masa reformasi, dengan dikembalikannya kekhasan pemerintahan di level desa. Kekuasaan masyarakat lokal untuk mengelola desa mendapat legitimasi (Widjaja, 2003). Di Sumatra Barat misalnya kita akan kembali menemukan adanya 'Nagari', di mana tetua adat memiliki pengaruh besar dalam pembangunan desa. Pengakuan desa-desa adat dalam pembangunan misalnya juga dapat kita temukan di beberapa wilayah di Bali, seperti Desa Panglipuran, Desa Tenganan yang saat ini juga menjadi objek wisata andalan berbasis desa.

Kajian yang akan dilakukan saat ini sedikit berbeda, mengingat pemberlakuan UU Desa No. 6 tahun 2014 yang memberikan otonomi kepada desa secara lebih maksimal. Tidak hanya desa-desa adat, melainkan seluruh desa di Indonesia akan mendapat anggaran untuk menjalankan pembangunan. Oleh karenanya, kontestasi politik (baik dalam terminologi kekuasaan) maupun politik dalam

wacana ekonomi menjadi sebuah kajian baru yang penting untuk dipetakan.

Komunikasi politik yang ada di aras lokal cukup menarik untuk di lihat lebih mendalam, kerana disinilah kepemimpinan seorang kepala desa benar-benar diuji dalam menjalankan pemerintahan desa (Seftyono, et.al., 2016). Sebagai institusi yang paling dekat dengan masyarakat, desa dituntut untuk memberikan pelayan yang optimal dan memuaskan tanpa ada diskriminasi.

Muncuknya pemimpin-pemimpin lokal dengan gaya kepemimpinan dan komunikasi politiknya masing-masing membuat banyak variasi inovasi pembangunan desa yang bisa disebarluaskan. Komunikasi yang dilakukan kepala desa kalisidi salah satunya, sebagai desa yang cukup terpencil tidak mengurungkan niat kepala desa kalisidi untuk bisa mengembangkan desanya dan mempromosikan keunggulan-keunggulan yang di lakukan oleh masyarakat desanya.

Secara sederhana komunikasi sebagai sebuah proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain. Melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-angka, dan lain-lain.

Kepala desa dituntut untuk bisa menyampaikan informasi dengan baik ke seluruh masyarakatnya. gaya komunikasi yang baik secara langsung bisa membuat situasi kegiatan pemerintahan maupun pembangunan di desa lebih pasat, baik secara

langsung berbentuk infrastruktur maupun modal sosial yang dimiliki individu kepala desa maupun masyarakat secara keseluruhan.

Komunikasi politik yang dilakukan kepala desa selain sebagai sarana interaksi juga sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan yang ada di desa, karena setiap interaksi yang dilakukan oleh kepala desa disitulah juga membuat masyarakat juga ikut bergerak dalam proses pembangunan, dan itu terjadi sebaliknya apabila kepala desa tidak memiliki komunikasi politik yang tidak baik bisa saja terjadi penolakan dari masyarakat.

Komunikasi yang dibangun oleh Desa Kalisidi memiliki perbedaan dengan desa yang lainnya. Kepala desa yang masih dapat dikategorikan sebagai Kades yang tergolong muda memiliki kapasitas diri yang baik. Sebagai kepala desa tidak semena-mena dan arogan, sebaliknya karakteri yang di tonjolkan adalah santun, murah senyum, mau berbaur dengan siapa saja, menghormati bawahan “menghormati perangkat desa”, mau bernaur dengan masyarakat tanpa pandangbulu, dan kreatif.

Santun dan murah senyum sering ditunjukkan kepada siapa saja yang menyapanya, sering juga kepala desa duluan yang menyapa masyarakat yang lewat dihadapannya untuk menunjukkan rasa peduli dengan warganya. Mudah berbaur dengan siapa saja memiliki arti kepala desa tidak memilih dan memilih dalam preses berinteraksi melainkan dia mencoba

berinteraksi dengan kalangan manapun, bahkan kepala desa membuat inisiasi untuk membuat grup Whatsapp untuk warganya agar permasalahan bisa cepat ditangani olehnya.

Komunikasi yang dilakukan oleh kepala desa memiliki banyak jenisnya, salah satunya dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1. Tabel komunikasi Kepala Desa

Desa Kalisidi	Desa Gonoharjo	Desa Diwak
<ul style="list-style-type: none"> - Pendekatan langsung dengan masyarakat (saluran komunikasi interpersonal). - Pendekatan antar Lembaga Kemasyarakatan Desa “LKMD” (saluran komunikasi kelompok organisasi serta jaringan komunikasi). - Pembuatan Papan Informasi Anggaran Desa sebagai wujud Transparansi. - Menggunkakan media sosial (FB, Tweeter, Website, Instagram, Youtube) - Pembuatan media sosial sebagai sarana Informasi Publik. - Pembuatan Papan Iklan sebagai media sosialisasi gerakan desa wisata dan desa edukasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendekatan langsung dengan masyarakat (saluran komunikasi interpersonal) - Pendekatan pembuatan informasi anggaran desa sebagai wujud transparansi. - Pendirian masyarakat pecinta pariwisata sebagai wujud promosi dan manajemen desa wisata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendekatan langsung dengan masyarakat (saluran komunikasi interpersonal) - Saluran komunikasi kelompok organisasi serta jaringan komunikasi. - Pendirian masyarakat pecinta pariwisata sebagai promosi manajemen - Komunikasi dengan pengusaha sekeliling desa (Sido Muncul) untuk membantu hibah dalam rangka pembangunan

Sumber : Hasil olah wawancara.

Dari tabel 1. di atas secara garis besar komunikasi yang dilakukan kepala desa cukup baik, pendekatan secara langsung dengan masyarakat (saluran interpersonal) tetap dirasa menjadi pilihan yang paling tepat untuk berinteraksi dengan masyarakat desa.

Karena kondisi masyarakat desa yang jumlahnya tidak terlalu banyak dan luas wilayahnya juga masih dapat dijangkau, interaksi secara langsung dengan masyarakat juga membuat modal sosial kepala desa khususnya *trust* lebih kuat karena sering bertemu dan berkumpul dengan masyarakat.

Trust yang dimiliki kepala desa muncul karena ikatan sosial yang berada di masyarakat desa masih sangat kuat. Kondisi ini memang sering terjadi di kalangan masyarakat pedesaan yang kondisinya masih homogen antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya sehingga rasa saling percaya masih dapat muncul.

Selanjutnya, cara kepala desa melakukan pendekatan personal kepada warganya dengan cara ikut langsung ikut dalam kegiatan pengajian-pengajian yang ada di setiap rukun warganya, bahkan kepala desa sering bergiliran untuk mendatangi perkumpulan atau pengajian yang sering dilakukan oleh masyarakat, selain itu karena kepala desa masih tergolong muda berkumpul di warung dan tempat-tempat keramaian seperti pos ronda sering di datangi untuk bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Gaya komunikasi yang dibangun lebih untuk tidak membuat jarak antara pejabat dan masyarakat biasa. Membuat masyarakat menjadi subjek dalam berinteraksi dan pembangunan sehingga masyarakat bisa merasakan kehadiran kepala desa bukan hanya sebagai kepala pemerintahan tertinggi di desa

tetapi juga kepala desa dapat dikatakan sebagai sepeuh atau orang yang dituaikan di masyarakat desa.

Selain itu informasi pembangunan sering diberikan melalui papan informasi yang diletakkan di tempat-tempat strategis seperti pos ronda, depan masjid dan tempat umum lainnya. Sehingga masyarakat bisa melihat dan mengetahui secara langsung informasi dan rencana pembangunan yang ada di desanya.

Penyampaian informasi secara tulisan di tempat-tempat strategis memberikan dampak yang cukup baik bagi masyarakat, selain adanya transparansi yang dilakukan oleh kepala desa dan masyarakat juga senang karena mereka tau pengelolaan keuangan yang dikelola oleh desa disalurkan kemana saja sebagai bentuk *feedback* yang dilakukan dari pemerintah desa dengan masyarakatnya berjalan dengan baik.

Kedua, yang sering dilakukan kepala desa dalam komunikasi politik menggunakan pendekatan struktural kelembagaan dengan berinteraksi dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Lembaga kemasyarakatan yang ada di desa tidak hanya menjadi objek pembangunan melainkan mereka juga diajak menjadi subjek pembangunan yang ada di desa, karena dirasa perlu adanya semua elemen terlibat dalam memajukan sebuah desa menjadi lebih baik.

Selain komunikasi langsung, kepala desa juga sering membuat komunikasi tak

langsung dengan pembuatan papan informasi, baik papan informasi yang menjelaskan tentang kegiatan yang ada dipemintah desa (Kades Gonoharjo), dan juga ada papan informasi yang di buat untuk menunjukkan anggaran pemerintah desa sebagai bentuk Transparansi (Kades Kalisidi).

Selain website media sosial lainnya seperti Facebook, Tweter, Instagram dan Youtube juga menjadi sarana penyampaian informasi kepada khalayak luas, bahkan bukan hanya menyampaikan informasi kegiatan yang ada disesa saja melainkan sudah merambah untuk mempromosikan potensi sumberdaya alam maupun wisata yang ada di desa (Objek Wisata Cuklawa dan Benowo).

Pendekatan partisipatif dalam menjalin komunikasi antara kepala desa dan masyarakat masih di utamakan. Temuan yang terjadi di lapangan kepala desa lebih suka melakukan pendekatan interpersonal dengan masyarakat agar masyarakat bisa berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan yang ada didesa.

Kondisi masyarakat desa yang masih homogen membuat ikatan kekeluargaan antar masyarakat masih sangat kuat, kegiatan interaksi antar individu masih sangat sering terjadi sehingga sejauh ini masyarakat cukup aktif dalam proses pembangunan yang ada didesa dengan kata lain gotong royong masyarakat desa disini masih sangat baik. Sehingga apapun tawaran pembangunan yang diberikan oleh pemerintah desa hanya sebagai

stimulus untuk menggerakkan semangat gotong royong warga saja.

Kiprah kepala desa dalam inovasi perkembangan dan kemajuan desa cukup besar, banyak program yang diluncurkan untuk mengayomi dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. kepala desa sebagai pimpinan tertinggi di tingkat desa memiliki peran yang sangat penting selain sebagai pengatur regulasi kepala desa juga sering di anggap sebagai orang yang dituakan atau sesepuh desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepala desa memiliki *trust* yang baik dengan masyarakatnya. Sehingga banyak pendekatan interpersonal yang dilakukan untuk mengajak dan menjalankan inovasi pembangunan yang ada di desa.

Bentuk relasi yang dilakukan oleh kepala desa untuk meningkatkan inovasi pembangunan sangat cukup banyak, mulai melakukan kerja sama dengan pemerintah kabupaten dengan mengajukan permohonan perbaikan jalan yang dimiliki kabupaten, melakukan perluasan jalan milik desa dengan menggandeng masyarakat untuk bisa ikut membebaskan lahannya agar dijadikan fasilitas umum tanpa mengeluarkan uang ganti rugi oleh pemerintah desa.

Selama kepemimpinan ketiga kepala desa ini, banyak gebrakan inovasi pembangunan yang dilakukan untuk meningkatkan infrastruktur desa, sarana dan prasarana desa, serta menciptakan terwujudnya desa yang asri dan layak huni

dengan beberapa program kegiatan yang dilaksanakan seperti :

Tabel 1.2. Inovasi Pembangunan Desa

No	Nama Kegiatan	Deskripsi Program
1	Pembangunan dan Perluasan Jalan	Salah satu program peningkatan infrastruktur jalan yang dilakukan untuk menunjang kemajuan ekonomi yang ada di desa.
2	Kandang Komunal	Program inovasi pengurangan pemukiman kumuh karena rumah warga yang berdekatan dengan kandang ternak. Dibuatlah kandang komunal sebagai salah satu sarana umum untuk menaruh hewan ternak seperti sapi, kerbau, dan kambing yang jaraknya tidak dekat dengan pemukiman warga dan lahan yang digunakan milik pemerintah desa.
3	Sumbangan Huni Perbaikan Rumah Layak	Program PRLH dilakukan sebagai bentuk kegiatan sosial agar semua masyarakat merasakan rumah yang layak huni dengan diberikannya sumbangan diambilkan dari Anggaran Dana Desa yang ada di desa bisa (ADD)
4	Pembangunan Pusat oleh-oleh milik	Sebagai desa yang memiliki potensi objek wisata dan dikelola oleh-oleh

Sumber : Hasil olah wawancara di tiga desa.

Hambatan yang sering muncul di masyarakat memang terkait masalah pendanaan dan kualitas sumber daya manusia yang masih rendah dalam proses perencanaan pembangunan yang baik. Terkait hambatan pendanaan memang akhir ini sudah bisa diatasi dengan dikeluarkannya dana desa yang bisa digunakan sebagai penggerak pembangunan yang ada di desa. Masyarakat hanya harus bersabar untuk menunggu daerahnya atau lingkungannya dibangun oleh pemerintah desa, karena memang anggaran dana desa yang dikeluarkan berdasarkan

prioritas kegiatan atau program yang ada di desa pada tahun tersebut.

Kualitas sumber daya manusia yang masih rendah dalam proses perencanaan pembangunan yang ada di desa memang masih menjadi pekerjaan rumah yang belum bisa terpecahkan. Masih banyak perangkat desa sebagai pembantu kepala desa belum memiliki kapasitas personal yang baik, secara komunikasi dengan masyarakat maupun perencanaan pembangunan yang cukup banyak disebabkan oleh latar belakang pendidikan yang masih minim sehingga dirasa *hard skill* maupun *soft skill* yang masih kurang dalam menunjang pekerjaannya.

Kesimpulan

Komunikasi politik yang dilakukan oleh kepala desa sebagai sarana menunjang inovasi pembangunan yang ada di desa dirasa sangat penting. Komunikasi interpersonal menjadi pilihan yang paling sering digunakan oleh kepala desa dalam berkomunikasi sehari-hari, selain itu media sosial juga dirasa menjadi wahana komunikasi yang cukup efektif di era sekarang ini. Komunikasi juga dirasa sebagai tolak ukur kesuksesan inovasi pembangunan yang ada di desa.

Kepala desa dituntut untuk bisa bersikap dan bertindak sesuai dengan kultur budaya yang ada di masyarakat sehingga kepercayaan (*trust*), Norma dan Jaringan (*network*) yang sudah terbangun di masyarakat akan semakin kuat, dan imbasnya akan berimplikasi secara langsung

dengan inovasi pembangunan yang ada di desa.

Daftar Pustaka

- Antlöv, H. (2003). Village government and rural development in Indonesia: The new democratic framework. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 39(2), 193-214.
- Curran, J. (2002). *Media and power*. Psychology Press. Dwipayana, A., & Eko, S. (2003). Membangun Good Governance di Desa. *Jogjakarta: Institusi for Research and Empowerment*.
- Eko, S. (2014). Desa Membangun Indonesia. *FPPD. Yogyakarta*.
- Hamad, I. (2010). Media dan Demokrasi di Asia Tenggara: Kasus Indonesia. *Universitas Indonesia*.
- Juliantara, D. (2000). Arus Bawah Demokrasi: otonomi dan pemberdayaan desa. *Lapera, Yogyakarta*.
- Maskun, S. (1994). Pembangunan Masyarakat Desa: Asas. *Kebijakan dan Manajemen, PT Media Widya Mandala, Yogyakarta*.
- Permatasari, Dessi dan Cahyo Seftyono (2014), Musyawarah Mufakat atau Pemilihan Lewat Suara Mayoritas? Diskursus Pola Demokrasi di Indonesia, *Mimbar Demokrasi*, Vol. 12 No. 2, pp. 1-13.
- Seftyono, C. (2014). Rawa Pening Dalam Perspektif Politik Lingkungan: Sebuah Kajian Awal. *Indonesian Journal of Conservation*, 3 (1).
- Seftyono, C. (2010). Local Community in Valuing Ecosystem Services: Warga Kampung Code's Perspective on Kali Code Existence.
- Seftyono, C. (2011). Pengetahuan Ekologi Tradisional Masyarakat Orang Asli Jakun dalam Menilai Ekosistem Servis di Tasik Chini, Malaysia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 15(1), 55-67.
- Seftyono, C., Arumsari, N., Arditama, E., & Luthfi, M. (2017) Kepemimpinan Desa dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Aras Lokal: Kajian Awal Di Tiga Desa di Lereng Gunung Ungaran, Jawa Tengah. *Otoritas, Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6 (2), 60-70. (In Press)
- Suharyanto, S., & Sofianto, A. (2015). Model Pembangunan Desa Terpadu Inovatif Di Jawa Tengah. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 4 (4), 251-260.
- Suroso, H., Hakim, A., & Noor, I. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. *WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora*, 17 (1), 7-15.

- Widjaja, H. A. W. (2003). *Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh*. RajaGrafindo Persada.
- Yusuf, I. A. (2011). Media Lokal dalam Konstelasi Komunikasi Politik di Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 14 (3), 297-316.